



PENETAPAN

81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

FRANGKI RIONARDO LAY , Tempat Tanggal Lahir Kadumbul, 11 Juli 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Menia RT. 007, RW.004, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat , Kabupaten Sabu Raijua , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta , Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

FEMY ROHI , Tempat Tanggal Lahir Raerobo , 24 Februari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Menia RT. 007, RW.004, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat , Kabupaten Sabu Raijua , Agama Kristen Protestan , Pekerjaan ASN (PPPK) , Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 7 Februari 2024 , tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 81 / Pdt.P / 2023 / PN Kpg., tertanggal 7 Februari 2024 , tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 Februari 2024 dibawah Register No : 81 / Pdt.P / 2023 / PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No: 81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 juni 2017 sesuai dengan akta perkawinan nomor: 5320-KW-10102019-0001 tertanggal 01 November 2019
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan dua orang anak yang bernama :
 - MENTARI CAECILLIA LAY lahir di Sabu Raijua tanggal, 09 November berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5220-LT-22102019, tanggal 1 November 2011 dan
 - ARSHAVIN CZAREN LAY, lahir di Sabu Raijua tanggal 1 September 2017 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 5220-LT-23102019-0007, tertanggal 1 November 2011;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di pesidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang Bernama :
 - MENTARI CAECILLIA LAY lahir di Sabu Raijua tanggal, 09 November 2013;
 - ARSHAVIN CZAREN LAY, lahir di Sabu Raijua tanggal 1 September 2017; di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap; Kabupaten Sabu Raijua.
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No: 81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama FRANGKI RIONARDO LAY , tertanggal 06-07-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama FEMY ROHI , tertanggal 24-02-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5320-KW- 10102019-0001, tanggal 01 November 2019 , antara FRANGKI RIONARDO LAY dan FEMY ROHI , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran atas nama MENTARI CAECILLIA LAY, tertanggal 01 November 2019 , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran atas nama ARSHAVIN CZAREN LAY, tertanggal 01 November 2019 , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5320010808190004 atas nama Kepala Keluarga FRANGKI RIONARDO LAY , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing - masing **telah didengar keterangannya di bawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : YUNITA PAH

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu



- Bahwa benar anak – anak dari para Pemohon yang bernama bernama MENTARI CAECILLIA LAY, lahir di Menia 09 November 2013 dan ARSHAVIN CZAREN LAY lahir di Sabu Raijua 01 September 2017
- Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon I adalah Ayah Biologis dari anak tersebut, dan Pemohon II adalah Ibu Biologisnya;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan orang tuanya sehingga setelah orang tuanya menikah baru buat Pengesahan anak;
- Bahwa benar kedua orang tuanya sekarang sudah menikah sah;
- Bahwa saya menyaksikan sendiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Surat Pengakuan Anak tersebut ditandatangani oleh para Pemohon sendiri;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Saksi II : : DANIEL ROHI

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai keponaan;
- Bahwa benar anak – anak dari para Pemohon yang bernama bernama MENTARI CAECILLIA LAY, lahir di Menia 09 November 2013 dan ARSHAVIN CZAREN LAY lahir di Sabu Raijua 01 September 2017
- Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon I adalah Ayah Biologis dari anak tersebut, dan Pemohon II adalah Ibu Biologisnya;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan orang tuanya sehingga setelah orang tuanya menikah baru buat Pengesahan anak;
- Bahwa benar kedua orang tuanya sekarang sudah menikah sah;
- Bahwa saya menyaksikan sendiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Surat Pengakuan Anak tersebut ditandatangani oleh para Pemohon sendiri;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No: 81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan agar anak yang bernama MENTARI CAECILLIA LAY, lahir di Menia 09 November 2013 dan ARSHAVIN CZAREN LAY lahir di Sabu Raijua 01 September 2017 agar dinyatakan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No: 81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam :

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No: 81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta Kelahiran atas nama MENTARI CAECILLIA LAY Nomor 5320-LT-23102019-0007 tanggal 1 November 2019 , (*vide* bukti P-4)
2. Akta Kelahiran atas nama ARSHAVIN CZAREN LAY Nomor 5320-LT-23102019-0007 tanggal 1 November 2017 (*vide* bukti P-4);
3. Kartu Keluarga No. 5320010808190004 atas nama Kepala Keluarga FRANGKI RIONARDO LAY (*vide* bukti P-5);
4. Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 7 Februari 2024 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-10102019-0003, tanggal 10 Oktober 2019 (*vide* bukti P-3), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim meyakini bahwa benar anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh para Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No: 81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama : MENTARI CAECILLIA LAY, lahir di Menia 09 November 2013 dan ARSHAVIN CZAREN LAY lahir di Sabu Raijua 01 September 2017, adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan Pengesahan anak tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin , tanggal 26 Februari 2024** oleh kami : **Sarlota Marselina Suek , SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H.,**

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No: 81 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

LIDIA MARLIES FLORENCE MBOEIK, S.H.

SARLOTA M. SUEK, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....		
Rp. 100.000,	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
JUMLAH		Rp. 110.000,
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		